

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN**

(Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar Tahun 2013-2015)

OLEH :

FARIYADI DWI APRIYANTO THAHIR

B11113386

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN

(Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar Tahun 2013- 2015)

Oleh

FARIYADI DWI APRIYANTO THAHIR

B111 13 386

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Program Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Studi Ilmu Hukum**

Pada

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN

(Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar Tahun 2013-2015)

Disusun dan diajukan oleh:

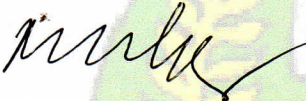
FARIYADI DWI APRIYANTO THAHIR

B111 13 386

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 06 Februari 2017
Dan Dinyatakan Diterima

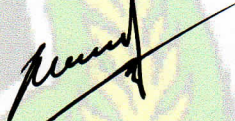
Panitia Ujian

Ketua,



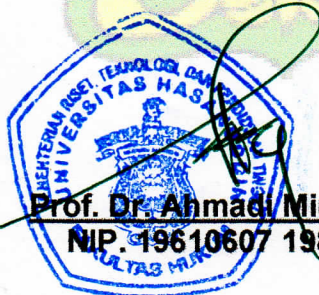
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris,



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan**



Prof. Dr. Ahmad Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FARIYADI DWI AT
Nomor Pokok : B11113386
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian (Studi Kasus Polrestabas Kota Makassar Tahun 2013-2015)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Fariyadi Dwi Apriyanto Thahir
Nim : B111 13 386
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana
Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian
(Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar Tahun
2013-2015)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi .

Makassar, January 2017

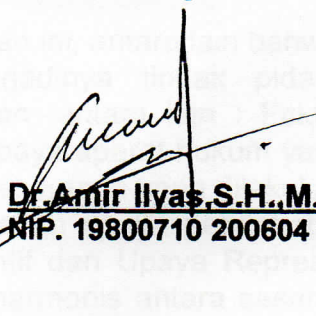
Disetujui oleh,

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing II



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
NIP. 19800710 200604 1 001

ABSTRAK

FARIYADI DWI APRIYANTO THAHIR (B 111 13 386), dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar Tahun 2013-2015)”**. Di bawah bimbingan Muhadar selaku Pembimbing I dan Amir Ilyas selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian dan yang ke dua, upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*Field research*) dan dilaksanakan di Kota Makassar Sulawesi Selatan, khususnya di Kantor Polrestabes Kota Makassar dengan mengambil berkas untuk mengetahui jumlah kasus, Data Mengenai Tindak Pidana KDRT, Penganiayaan dan Pengancaman Disertai Dengan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Kepolisian, data pelanggaran pada saat bertugas dan diluar tugas, pangkat/ jabatan yang tindak kekerasan. Selain itu, penulis juga mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas, yaitu beberapa anggota Propam Polrestabes Kota Makassar guna memperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian serta upaya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. Peneliti juga melakukan pengumpulan data-data berkenaan dengan objek penelitian dan melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku serta literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain bahwa: (1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian, antara lain : Faktor Ekonomi, Faktor Sosial dan Faktor Budaya. (2) Upaya aparat hukum yang berwenang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian adalah dengan menggunakan upaya pendekatan kriminologi yaitu Upaya Pre-emptif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Dan bukan hanya itu adanya terjalin hubungan harmonis antara sesama anggota polisi dan warga masyarakat.

ABSTRACT

FARIYADI DWI Apriyanto Tahir (B 111 13 386), entitled "**Review of the Crime of Violence Against criminological ducted by Person Police (Case Study Polrestabes Makassar City Year 2013-2015)**". Under the guidance of Muhadar as Supervisor I and Amir Ilyas as the Supervisor II.

This study aims to determine two things. First, the factors that cause criminal acts of violence committed by police officers and the second, the efforts of law enforcement officers in dealing with crimes of violence committed by police officers.

This study uses literature (library research) and methods of field research (field research) and implemented in the city of Makassar, South Sulawesi, particularly in the Office Polrestabes Makassar City by taking the file to determine the number of cases, Data On Crime of Domestic Violence, Abuse and threatening Accompanied By Crime of violence by the police, a data breach in the line of duty and off duty, rank / position that violence. In addition, the author also interviewed the parties that are directly related to the issues discussed, which some members of Propam Polrestabes Makassar City in order to obtain information about the factors that cause criminal acts of violence committed by police officers as well as efforts to tackle such crime. Researchers are also collecting data with regard to the object of research and to study literature by way of studying the books and literature related to the issues discussed in this thesis.

Results obtained in the study author, among other things that: (1) the factors that cause criminal acts of violence committed by police officers, among others: Economic Factors, Social and Cultural Factors Factor. (2) efforts of law enforcement authorities in dealing with crimes of violence committed by police officers is to use approaches that attempt criminology Pre-emptive, preventive efforts and repressive efforts. And not only that their harmonious relationship is established among the members of the police and citizens.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya lah, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tuntutan bagi seluruh kaum muslimin, Rahmat bagi alam semesta.

Skripsi ini persembahkan dari Penulis sebagai bentuk sumbangan akhir jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tentu saja berasal dari apa yang pernah penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa. Juga dari hasil penelitian dan diskusi penulis dengan beberapa narasumber yang terkait dengan tulisan ini dan tentu saja arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing terbaik.

Alhamdulillah dengan seizin Allah SWT dan segala pemikiran kemampuan yang Penulis miliki, maka skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar tahun 2013-2015)” dapat terselesaikan. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh Penulis. Untuk itu, terhadap segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam penyusunan penulis ini, Penulis senantiasa

mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda **Aiptu Muh. Thahir** dan Ibunda **St. Nurmaidah, S.KM., M.KES.**, atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Serta para Saudara, Muh Noerman Thahir, Faramitha Sri Puji Rahayu Thahir, Supriyadi Dwi Apriyatno Thahir, Faraditha Tri dini Thahir dan Fariyadli Eka Satria Thahir yang selalu mendukung secara moril. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patintingi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muhtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, Bapak Dr. Hamza Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. Selaku Pembimbing I bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. Selaku pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada Penulis selama ini demi terselesaikannya skripsi ini;
7. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM. sebagai Penguji I, Bapak Dr. Abd Asis, S.H., M.H. Sebagai Penguji II dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. sebagai penguji III, yang meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar, serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan dan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
10. Kepala Kepolisian Polrestabes Kota Makassar beserta staf dan jajarannya yang telah membantu Penulis selama proses penelitian.
11. Pada saudari Soraya Hatija Kasim yang tak henti-hentinya memberikan semangat dalam penulisan skripsi.
12. Para teman-teman Anak Halte yang memberikan suatu arti pertemanan dalam bangku perkuliahan.
13. Para Anak BP Squad yang selalu ada di luar kampus untuk menemani, dan selalu membantu baik suka maupun duka.

14. Teman-teman KKN Regular UNHAS Angkatan 93, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Desa Bonto Daeng;
15. Teman-teman di LP2KI yang sudah memberikan sumbangan ilmu yang bermanfaat kepada saya;
16. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Namun demikian penulis menyadari sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari hilaf dan salah hingga karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang positif dari para cerdik pandai demi kesempurnaan karya tulis ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah. Dan semoga semua yang telah kita kerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah, *Amin Ya Rabbal Alamiin*.

Makassar, Januari 2017

Penulis,

Fariyadi Dwi Apriyanto Thahir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. KRIMINOLOGI.....	11
B. Pidana, Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
1. Pidana.....	17
2. Tindak Pidana	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
C. Tindak Pidana Kekerasan	23
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	25
1. Teori Anomie.....	25
2. Teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance Theories).....	28
3. Teori Kontrol Sosial (Control Social Theory)	29
E. Kepolisian.....	31
1. Pengertian Kepolisian	31

2. Tugas dan Wewenang	34
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Jenis dan Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Analisis Data.....	42
BAB IV PEMBAHASAN	43
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian	43
1. Faktor Ekonomi.....	52
2. Fator Sosial	54
3. Faktor Budaya	57
B. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian.....	58
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian	44
Tabel 2 Data Mengenai Tindak Pidana KDRT, Penganiayaan dan Pengancaman Disertai Dengan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Kepolisian	45
Tabel 3 Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Pada Saat Bertugas dan Tindak Pidana Kekerasan Yang dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Pada Saat tidak bertugas.....	48
Table 4 Pangkat Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan pada tahun 2013-2015.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan “kekerasan” baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau berkelompok, sangat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Tampaknya kesadaran akan menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana yang diharapkan sehingga perilaku “berbuat baik untuk sesama atau terhadap orang lain” sudah semakin tidak kelihatan.

Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu organisasi sosial yang selalu bergerak dan berubah. Dalam pandangan Ibnu Khaldun,¹ konflik adalah bagian dari fitrah manusia sebagai elemen masyarakat yang selalu menuntut perubahan menyebabkan masyarakat tidak dalam kondisi yang stabil, terintegrasi, harmonis dan saling memenuhi. Namun dilain pihak manusia dilahirkan dengan otonominya sendiri atas pikiran yang dimilikinya dituntut untuk bisa menyelaraskannya dengan pihak lain. Berdasarkan fitrah tersebut maka masyarakat akan selalu

¹ Abd Ar Rahman Bin Muhammed Ibn Mukadimah, terjemahan Franz Rosenthal, ditelusuri melalui http://www.muslimphilosophy.com/ik/Muqaddimah/Chapter1/Ch_1_01.htm diakses pada tanggal 19 November 2016, pukul 10.00

memperlihatkan konflik dan perubahan. Dalam pandangan ini konflik dalam masyarakat pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mendorong masyarakat untuk berubah dan bergerak. Konflik dianggap sebagai suatu perubahan dalam sistem sosial. Konflik dan perubahan merupakan suatu siklus kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus.

Resolusi dalam konflik dipandang merupakan redistribusi atas kekuasaan atau kewenangan yang menjadikan konflik sebagai sumber perubahan sebagaimana dikemukakan diatas. Redistribusi peranan untuk mengatur merupakan bagian yang akan memicu bentuk konflik baru dalam perubahan tersebut. Dalam hal demikian maka redistribusi kekuasaan yang tergambar dalam kontrak sosial dalam pandangan ilmu hukum merupakan bentuk kongkrit dari kontrak sosial yang menempatkan Negara sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini negara diinterpretasikan dalam diri aparat negara maupun aparat penegak hukum.

Aparat penegakan hukum pada penerapan hukum agar benar-benar memikirkan dengan cermat penjatuhan hukuman sehingga dirasakan masyarakat hukuman tersebut telah setimpal dengan

kesalahan pelaku. Penyelesaian perkara dengan cepat dan tepat sangat membantu penegakan ketertiban/ketentraman masyarakat serta terciptanya kepastian hukum. Aparat Penegak hukum terdiri atas Anggota kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Polisi merupakan aparatur negara yang bertugas mewakili negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum seperti yang tercantum dalam Pasal 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Polisi dan masyarakat adalah dua subjek sekaligus objek yang tak mungkin terpisahkan. Polisi lahir karena adanya masyarakat, masyarakat membutuhkan kehadiran polisi, guna menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan masyarakat itu sendiri. Demikianlah teori lahirnya polisi (*politea*, yunani kuno) sampai pada lahirnya teori kepolisian modern dewasa ini.

Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan. Eksistensi kepolisian adalah lakon yang harus dijalankan sehubungan dengan atribut yang melekat pada individu maupun instansi, dalam hal ini diberikan oleh Kapolri didasarkan atas asas Legalitas undang-

undang yang karenanya merupakan kewajiban untuk dipatuhi oleh masyarakat. Agar peran ini bisa dijalankan dengan benar, pemahaman yang tepat atas peran yang diberikan harus diperoleh.²

Pemaknaan akan pelindung, Pengayom, dan pelayan masyarakat bisa beragam dari berbagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi dan langkah bagi kita, pemaknaan itu dapat dirumuskan:³

Pelindung: adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat, sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tentram dan damai.

Pengayom: adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan, dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram.

Pelayan: adalah anggota POLRI yang setiap langkah pengabdinya dilakukan secara bermoral, sopan, ramah dan proporsional.

Pemaknaan dari peran pelindung, pengayom, dan pelayan

² Johan Andreas S, Skripsi, *Peranan Kepolisian dalam pemberantasan minuman keras (miras) di wilayah hukum Polsek Medan Kota*. (Medan : Fakultas Hukum USU, 2006), hal. 49

³ Barda Namawi Arief. *Beberapa aspek kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hal 4

seyogyanya tidak hanya tampil setiap langkah kegiatan apapun yang dilakukan oleh personil POLRI berkaitan dengan tugasnya melainkan juga dalam perilaku kehidupannya sehari-hari.

Tampilan perilaku dimaksud akan sangat tergantung pula kepada integritas pribadi masing-masing anggota polisi, untuk bisa dilaksanakan secara sadar baik dan tulus. Pada intinya perilaku yang ditampilkan dapat berwujud :

Sebagai pelindung : Berikan bantuan kepada masyarakat yang merasa terancam dari gangguan fisik dan psikis tanpa perbedaan perlakuan.

Sebagai pengayom : Dalam setiap kiprahnya, mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif dan edukatif.

Sebagai pelayan : Layani masyarakat dengan kemudahan cepat, simpatik, ramah, sopan, serta pembebasan biaya yang tidak semestinya.

Sebagai pengayom, Polisi selalu simpatik dan ramah tamah. Disini ada tiga konsep Polisi yang relevan, yaitu *etis*, *open* (tanggap) dan *ojo dumei*. Sedangkan sebagai pengawas masyarakat, Polisi harus tegas, berwibawa dan kalau perlu keras. Satu lagi konsep *policy* Polri adalah relevan kuat, yaitu Polri harus sadar bahwa dirinya adalah

sebagai "*Crime Hunter*".⁴

Polisi memang harus bertindak keras tetapi tidak bengis harus melakukan pelayanan yang efisien tetapi tidak mengharap apapun, tidak memihak pada kesatuan apapun (khususnya bidang politik) demi tegaknya azas kepolisian. Bagi kepolisian hal-hal ini merupakan falsafah pelaksanaan tugas yang bersifat universal sebagai standar minimum perilaku organisasi Polisi.⁵

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan atau perbuatan melanggar hukum/kejahatan, dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan)
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

⁴ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal 97

⁵ Kunarto, *perilaku organisasi POLRI*, (Jakarta : Penerbit Cipta Manunggal, 2001), hal. 101

Mengamati tugas yuridis kepolisian yang demikian luas tetapi luhur dan mulia itu jelas merupakan beban yang sangat berat. Kejahatan dalam era modernisasi di Indonesia membawa implikasi bagi kerja polisi. Yakni, polisi akan lebih besar lagi tanggung jawabnya mengamankan masyarakat dari berbagai kejahatan. Bentuk pengamanan ini bukan hanya dituntut dengan cepatnya penyelesaian perkara, tapi tuntutan hak-hak asasi manusia.

Namun berbicara mengenai hak asasi manusia memberikan dapat suatu persepsi beragam bergantung pada siapa hak asasi manusia itu ditujukan. Dalam beberapa kasus terakhir ini pihak Kepolisian banyak melakukan kekerasan-kekerasan terhadap warga masyarakat, contohnya di kota makassar :

1. Penyerangan dan penganiayaan kepada jurnalis peliput demonstrasi Universitas Negeri Makassar oleh oknum kepolisian.
2. Kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap demo mahasiswa Universitas Muslim Indonesia.
3. Penyerangan Satuan Polisi Pamong Praja di kantor walikota Makassar.

Selain tiga kasus diatas, masih banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat. Beberapa kasus

di atas juga mencerminkan bagaimana sifat/sikap dari polisi khususnya polisis di Makassar dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kota Makassar mencatat sepanjang 2014, sedikitnya ada 19 kasus kekerasan yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh oknum kepolisian Makassar. Dari 19 kasus tersebut, 52 orang yang menjadi korban kekerasan aparat kepolisian. Dari 52 korban tersebut, 6 orang warga sipil yang meninggal dunia, 11 orang warga sipil yang kena luka tembak, 14 orang warga sipil mengalami penganiayaan dan 8 diantaranya berprofesi sebagai jurnalistik, 3 orang mahasiswa, 2 orang warga sipil, selebihnya mengalami terror.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasa Yang dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar Tahun 2013-2015).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian ?
2. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan bagi mahasiswa bagian hukum pidana pada khususnya.
2. Dapat menjadi bahan masukan sekaligus kritik yang membangun bagi aparat penegak hukum.

3. Menjadi bahan bacaan dan sebagai salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang peduli terhadap masalah hukum utamanya dalam hal tindak pidana kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KRIMINOLOGI

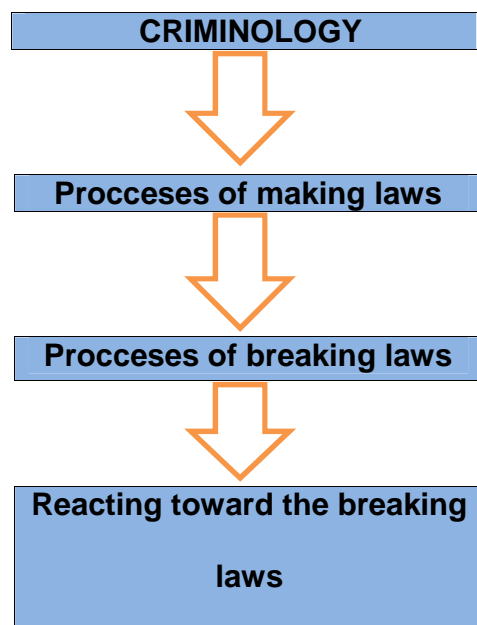
Nama kriminologi ditemukan oleh **P.Topinard** (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang dicakup dalam kriminologi. Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :⁶

1. **Edwin H. Sutherland:** *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
2. **J. Constant:** kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

⁶ Alam.s, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2012, hal 1-2.

3. **WME. Noach:** kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
4. **Bonger:** kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.
5. **R. Cresse:** Kriminologi adalah :⁷

Skema 1



Sumber : Buku Kriminologi, **Yesmil Anwar**

Dari gambar diatas mengandung pengertian, bahwa yang termasuk ke dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap para pelanggra

⁷ Yesmil Anwar, *kriminologi*, PT. Refika Aditama, bandung, 2013, hlm: 5

hukum. Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari tentang kejahatan saja, akan tetapi kriminologi mempelajari tentang bagaimana hukum itu berjalan.

Segala aspek tadi dipelajari oleh suatu ilmu tertentu, umpama jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi dan sosiologi, masalah keturunan dipelajari biologi, demikian pula masalah penjara dipelajari penologi dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan yang satu sama lain yang tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistemis disebut kriminologi. Inilah sebabnya orang mengatakan kriminologi merupakan gabungan ilmu yang membahas kejahatan. Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etilogi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Kriminologi juga dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu : ⁸

1. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam

⁸ Op.cit hal 4.

pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Kriminologi Teoritis terbagi atas :

- a. Antropologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.
- b. Sosiologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala social.
- c. Psikologi Kriminal yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
- d. Psikologi dan Neuro Phantologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. Penologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

2. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

- a. Hygiene Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olah raga, dan lainnya.

b. Politik Kriminal

Yaitu ilmu mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

c. Kriminalistik (*police scientific*)

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

Tetapi, menurut **SUTHERLAND** merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).⁹ Menurut **Sutherland** kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :¹⁰

1. Sosiologi Hukum

⁹ Santoso topo dan achjani zulfa eva, *Kriminologi*, Rajawali Pers, bandung, hal : 10-11.

¹⁰ Ibid hal 11.

Kejahatan ini adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan dalam hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum.

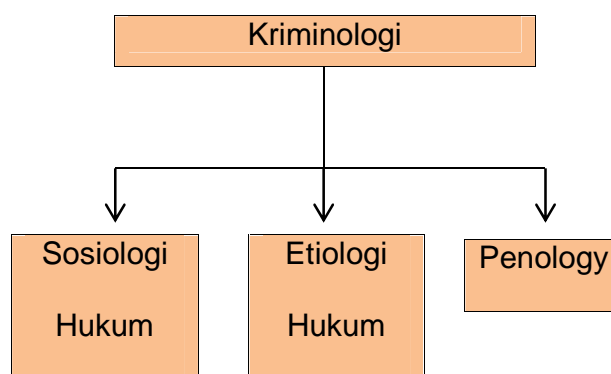
2. Etiologi Hukum

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukum, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengadilan kejahatan baik represif maupun preventif.

Skema 2



Sumber : Buku Kriminologi, **Santoso Topo dan Eva Acjani Zulfa**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu, penjahat, kejahatan dan masyarakat terhadap keduanya.

B. Pidana, Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pidana

Pidana berasal dari kata *Straf*, yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut **moeljatno** istilah hukum yang berasal dari kata *straf*, merupakan istilah yang konvensional.¹¹ Menurut **Andi Hamza** pakar hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*.¹² Istilah hukum adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrative, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana saja.¹³

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan

¹¹ Muladi dan *Barda Nawari*, *Pengantar Ilmu Hukum*, jogyakarta, 2005, hlm: 34.

¹² Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Indonesian*, rajawali pers, bandung, 2008, hlm: 1

¹³ Ibid hlm: 2

dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Menurut **Satochid Kertanegara** bahwa hukuman pidana itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undnag hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu norma yang ditentukan oleh undang-undnag hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu.¹⁴ Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Jiwa manusia (*leven*);
2. Keutuhan tubuh manusia (*lyf*);
3. Kehormatan seseorang (*eer*);
4. Kesusilaan (*zede*);
5. Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke Vryheid*);
6. Harta kekayaan (*vermogen*).

¹⁴ Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana*, Jakarta, 1995, hlm : 275-276.

¹⁵ Ibid hal 277-278

2. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah suatu dasar dalam hukum pidana (*yuridis normative*). Tindak pidana juga sering disebut dengan kata “delik”, delama Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut:¹⁶

“perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undnag tindak pidana”

Dilihat dari sisi perundang-undangan , perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat ini biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristia. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebyt uraian delik.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi delik, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta, 2001, hlm 65.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Menurut **Moeljatno** dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :¹⁷

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
4. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara itu, **Loebby Loqman** menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:¹⁸

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undnag.
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum.

¹⁷ Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm 99

¹⁸ Ibid hlm 98

4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut **EY. Kanter** dan **SR. Sianturi**, unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁹

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat dan keadaan.

Menurut **R. Tresna**, tindak pidana terdiri dari tiga unsur yakni:²⁰

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia).
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap

¹⁹ Ibid hlm 99

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali pers, Jakarta, 2013, hlm 69

perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). **Vos** berpendapat unsur-unsur tindak pidana adalah:²¹

1. Kelakuan manusia.
2. Diancam dengan pidana.
3. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dilihat pada unsur-unsur dari tiga batasan tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. **Jonkers** merincikan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:²²

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh yang dapat);
4. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, **Schravendijk** merincikan pula unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²³

1. Kelakuan (orang yang);
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
3. Diancam dengan hukuman;
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat);

²¹ Ibid.

²² Ibid. hal 81

²³ Ibid.

5. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

C. Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan dalam bahasa inggris "*violence*" berasal dari bahasa latin "*violentus*" yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum public dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi, baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok prang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan kebebasan.

Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar kekerasan yakni, kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan dan ibadah tanpa pengorbanan. Sistem nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dimana perbuatan kekerasan itu dilakukan, akan menentukan apakah perbuatan kekerasan itu dianggap baik atau

tidak. Misalnya dalam perang atau konflik bersenjata, kekerasan pada dasarnya diterima sebagai suatu tindakan kekerasan yang dianggap sah oleh kedua belah pihak yang bertikai atau bersengketa. Menurut **Zakariah Idris**, kekerasan adalah :²⁴

“perihal yang bercicir atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”

Sianturi memberikan arti kekerasan atau tindak kekerasan yaitu :²⁵

“melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang dikerasi itu kasihan, atau tidak berdaya”

Pasal 89 KUHP merumuskan kekerasan ialah :

“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Sehubungan dengan ketentuan dalam pasal 89 KUHP, **R**

Soesilo memberikan penjelasan tentang definisi kekerasan :²⁶

“melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyempak, menendang, dan sebagainya”

Kekerasan juga dapat dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan tindak pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak atau lebih dari satu orang dimana, secara langsung

²⁴ Idris Zakariah, *Psikologi Hukum*, solo, 1988, hlm: 452.

²⁵ Sianturi, *Hukum Pidana*, 1983, hlm: 610

²⁶ Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politelia, Bogor, 1996, hlm: 98

maupun tidak secara langsung, baik direncanakan maupun tidak direncanakan, telah terjalin kerjasama yang baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam suatu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun non fisik.

Berdasarkan uraian di atas maka kekerasan merupakan suatu perbuatan dengan penggunaan fisik ataupun alat secara tidak sah dan melanggar hukum baik dilakukan oleh perorangan ataupun berkelompok yang merugikan orang lain atau membuat akibat-akibat seorang tersakiti, terluka, pingsan, tidak berdaya lagi, atau bahkan menyebabkan kematian orang lain.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori penyebab terjadinya kejahatan di pandang dari sudut sosiologis dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain:²⁷

1. Teori Anomie

Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada perkembangan teori ini yaitu :

1. Emile Durkheim

Ahli Sosiologis Perancis Emile Durkheim (1858-1917), menekankan pada "*normlessness, lessens social control*" yang

²⁷ A.S.Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makassar. hal 45

berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualitas (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju ke suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Seperangkat aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh dan masyarakat itu berada dalam kondisi anomi.

2. Robert Merton

Robert Merton dalam "*social theory and social structure*" pada tahun 1957 yang berkaitan dengan teori anomi Durkheim mengemukakan bahwa anomie adalah suatu kondisi manakala tujuan tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial.

Dengan kata lain *anomie is a gap between goals and means creates deviance*. Masalah sesungguhnya tidak diciptakan oleh *sudden social change* tetapi oleh *social structure* yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk mencapainya.

Teori anomie dari Merton menekankan pentingnya dua unsur penting di setiap masyarakat, yaitu *cultural aspiration* atau *culture goals* dan *institutionalised means* atau *accepted ways*. Dan disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan (strain).

Merton mengemukakan bentuk kemungkinan penyesuaian atau adaptasi bagi anggota masyarakat untuk mengatasi strain (*mode of adaptation*), yaitu :

- A. *Conformity*, merupakan perilaku yang terjadi manakala tujuan dan cara yang sudah ada dimasyarakat diterima dan melalui sikap itu seseorang mencapai keberhasilan.
- B. *Innovation*, terjadi ketika masyarakat beralih menggunakan *illegitimate means* atau sarana-sarana yang tidak sah jika mereka menemui dinding atau halangan terhadap sarana yang sah untuk menemui sukses ekonomi tersebut.
- C. *Ritualism*, adanya penyesuaian diri dengan norma-norma yang mengatur *institutionalized means*, dan hidup dalam batas-batas rutinitas hidup sehari-hari.

D. *Retreatism*, mencerminkan mereka yang terlempar dari kehidupan kemasyarakatan.

E. *Rebellion*, adaptasi orang-orang yang tidak hanya menolak, tetapi juga berkeinginan untuk mengubah sistem yang ada (demonstrasi).

2. Teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance Theories)

Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. *Cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, adalah :

1. *Social disorganization*

Memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

2. *Different association*

Teori Sutherland ini merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Dan bahwa individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum.

3. *Cultural conflict*

Teory ini menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- A. Kurangnya ketetapan dalam pergaulan.
- B. Sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda dan bahkan ada yang saling bertentangan.

3. **Teori Kontrol Sosial (Control Social Theory)**

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.

Ada beberapa tokoh dari teori kontrol sosial yaitu :

1. Albert J. Reiss, Jr.

Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja :

- A. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak.
- B. Hilangnya kontrol tersebut.
- C. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di sekolah, orang tua, atau dilingkungan dekat.

Reiss juga membedakan dua macam kontrol yaitu pertama, *personal control (internal control)* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kedua, *social control* atau kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

2. Ivan F. Nye

Nye telah mengemukakan teori sosial kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi merupakan penjelasan yang bersifat kasuistik. Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, di samping unsur subkultural dalam

proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus delinquency menurut Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.

Menurut Nye terdapat empat tipe kontrol sosial, yaitu :

- A. Direct control which come from discipline, restrictions, punishment.*
- B. Internalized control which is the inner control from conscience.*
- C. Indirect control which is exerted by not wanting to hurt or go against the wishes of parents or other individuals whom the person identifies.*
- D. The availability of alternative means to goals and values.*

E. Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, pada pasal satu menjelaskan tentang pengertian Kepolisian. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kepolisian adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai

penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugas di lapangan.²⁸

²⁸ Suhartini Eni, *undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 30-31

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, sering dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokrasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun dalam penyelenggaraannya fungsi kepolisian, Kepolisian Republik Indonesia dibantu oleh Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai akuntabilitas paradigma supremasi hukum, dalam undang-undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan kepolisian, yaitu melakukan penyelidikan dan

penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan pertaruran perundang- undangan.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, setiap pejabat kepolisian memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat kepolisian dapat dipertanggung jawabkan. Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya setiap anggota kepolisian wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

2. Tugas dan Wewenang

Menurut pasal 13 undang-undang kepolisian, yang menjadi tugas pokok kepolisian adalah:²⁹

- A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- B. Menegakkan hukum, dan

²⁹ Ibid hlm 34

C. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi. Karena pada dasarnya ketiga tugas pokok kepolisian tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ii harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokok, kepolisian juga memiliki beberapa tugas lainnya, antara lain:³⁰

- A. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- B. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancara lalu lintas di jalan.
- C. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan

³⁰ Ibid Hlm 8

warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang—undangan.

- D. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- E. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- F. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa.
- G. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.
- H. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan kepolisian.
- I. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- J. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
- K. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian.

- L. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas kepolisian, adapun kewenangan-kewenangan kepolisian, antara lain :³¹

- A. Menerima laporan dan pengaduan.
- B. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- C. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- D. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- E. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.
- F. Melaksanakan pemerintahan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- G. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- H. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- I. Mencari keterangan barang bukti.
- J. Penyelenggarakan pusat informasi criminal nasional.

³¹ Ibid hlm 10

- K. Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang diperlukan dalam putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- L. Memberikan bantuan keamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- M. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun kewenangan lain kepolisian menurut peraturan perundang-undangan :³²

- A. Memberikan izin dan mengenai kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- B. Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- C. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- D. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- E. Memberi izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata api.
- F. Memberi izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

³² Ibid hlm 11

- G. Memberi petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- H. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan membrantas kejahatan internasional.
- I. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- J. Mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- K. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup kepolisian.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:³³

1. Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-

³³ Ibid. hal 79

nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan lanjutan dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus studi di Polrestabes Kota Makassar, Polda Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Makassar dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Alasan Penulis memilih lokasi penelitian di Polrestabes Kota Makassar karena Penulis menganggap bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi pengumpulan data kekerasan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak instansi terkait sehubungan dengan objek penelitian.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian Pustaka (*library research*), yaitu memperoleh data melalui berbagai literatur yakni, buku, koran, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan interview (wawancara) dengan pihak-pihak instansi terkait guna memperoleh data yang akurat.

D. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh Penulis dari hasil penelitian baik dari data primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kemudian data tersebut dituliskan secara deskriptif guna memberikan gambaran yang jelas dan konkrit dari hasil penelitian Penulis nantinya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian sudah tidak asing lagi terdengar di kalangan masyarakat, khususnya mengenai kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap seseorang atau kelompok yang mengakibatkan penderitaan bukan hanya fisik saja akan tetapi mental seseorang atau kelompok tersebut. Banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian dengan faktor-faktor yang berbeda. Faktor-faktor tersebut diantaranya faktor ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Sebelum membahas jauh tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan data mengenai pelanggaran anggota kepolisian yang terjadi di kota Makassar. Data tersebut diperoleh penulis dalam melakukan penelitian di Polrestabes Kota Makassar. Dari data yang diperoleh penulis dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian serta upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polrestabes Kota Makassar, penulis mendapatkan data kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang terjadi di wilayah Kota Makassar pada kurun waktu 2013 sampai 2015. Yang dimana dalam kurun waktu tersebut, tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian ada kalanya meningkat dan ada kalanya menurun, yang dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 1
Data Mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh oknum
kepolisian

Nomor	Tahun	Kekerasan (kasus)
1	2013	9
2	2014	6
3	2015	7
Jumlah		22

Sumber: Polrestabes Kota Makassar 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat terlihat bahwa Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar terdapat 22 (dua puluh dua) kasus, dimana pada tahun 2013 terjadi 9 (sembilan) kasus, pada tahun 2014 terjadi 6 (enam) kasus dan pada tahun 2015 terjadi 7 (tujuh) kasus.

Selain mengetahui data mengenai jumlah anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan pada tahun 2013 hingga 2015, penulis akan memaparkan data mengenai Tindak Pidana KDRT, Penganiayaan dan Pengancaman Disertai Dengan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Kepolisian, antara lain yang dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2

Data Mengenai Tindak Pidana KDRT, Penganiayaan dan Pengancaman
Disertai Dengan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Kepolisian

Nomor	Tahun	KDRT	Penganiayaan	Pengancaman
1	2013	1	5	3
2	2014	1	3	2
3	2015	1	3	3
Jumlah		3	11	8

Sumber: Polrestabes Kota Makassar 2017

Berdasarkan table diatas, penulis dapat simpulkan bahwa pada tahun 2013, wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar mencatat Kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian disertai KDRT sebanyak 1 (satu) kasus. Pada tahun bersamaan wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar mencatat Kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian disertai Penganiayaan sebanyak 5 (lima) kasus. Dan

pada saat tahun yang sama wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar mencatat Kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian disertai pengancaman sebanyak 3 (tiga) kasus.

Pada tahun 2014, wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar mencatat Kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian disertai KDRT sebanyak 1 (satu) kasus. Ditahun yang sama wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar mencatat Kekerasan yang dilakukan Oleh oknum kepolisian disertai Penganiayaan sebanyak 3 (tiga) kasus. Ditahun yang sama wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar mencatat Kekerasan yang dilakukan Oleh oknum kepolisian disertai Pengancaman sebanyak 2 (dua) kasus.

Pada tahun 2015, wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar mencatat Kekerasan yang dilakukan Oleh oknum kepolisian disertai KDRT sebanyak 1 (satu) kasus. Ditahun yang sama wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar mencatat Kekerasan yang dilakukan Oleh oknum kepolisian disertai Penganiayaan sebanyak 3 (tiga) kasus. Ditahun yang sama wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar mencatat Kekerasan yang dilakukan Oleh oknum kepolisian disertai Pengancaman sebanyak 3 (tiga) kasus.

Dari data diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, Kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian disertai KDRT mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 3 (tiga)

kasus. Sedangkan Kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian disertai dengan Penganiayaan mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 11 (sebelas) kasus. Sedangkan Kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian disertai dengan pengancaman mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 8 (delapan) kasus. Dalam data diatas penulis dapat simpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian disertai dengan penganiayaan mulai pada tahun 2013 hingga 2015 adalah yang paling banyak dilakukan oleh anggota kepolisian dengan 11 (sebelas) kasus.

Dalam peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa dalam pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab anggota kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara Profesional dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya. Jadi dalam melaksanakan tugasnya, anggota kepolisian memiliki kode etik profesi yang harus dipatuhi. Tetapi masih banyak oknum kepolisian yang melanggar kode etik profesi tersebut, contohnya melakukan tindak pidana kekerasan.

Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut bukan hanya dilakukan pada saat bertugas saja, akan tetapi

Tindak Pidana Kekerasan tersebut dilakukan pada saat diluar tugas.

Hal ini dapat kita lihat bersama pada table berikut ini :

Tabel 3

Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Pada Saat Bertugas dan Tindak Pidana Kekerasan Yang dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Pada Saat tidak bertugas

Nomor	Tahun	Pada Saat Bertugas	Pada Saat Diluar Tugas
1	2013	2	7
2	2014	1	5
3	2015	-	7
Jumlah		3	19

Sumber: Polrestabes Kota Makassar 2017

Melihat data tabel diatas, penulis dapat simpulkan bahwa pada tahun 2013, Kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian pada saat menjalankan tugas adalah 2 (dua) kasus, sedangkan Kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian pada saat diluar menjalankan tugas adalah 7 (tujuh) kasus. Pada tahun 2014, kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian pada saat menjalankan tugas adalah 1 (satu) kasus, sedangkan Kekerasan yang dilakukan oleh oknum

kepolisian pada saat diluar menjalankan tugas adalah 5 (lima) kasus. Pada tahun 2015, tidak terjadi kasus Kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian pada saat menjalankan tugas, lain halnya pada saat tidak menjalankan tugas, kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian adalah sebanyak 7 (tujuh) kasus.

Dapat disimpulkan pada table diatas Kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian pada saat menjalankan tugas terbanyak adalah pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) kasus, sedangkan Kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian pada saat diluar tugas terbanyak adalah pada tahun 2013 dan tahun 2015 sebanyak 7 (tujuh) kasus. Melihat data diatas bahwa kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian banyak terjadi pada saat diluar tugas dengan 19 (Sembilanbelas) kasus, hal tersebut menjadi penilaian masyarakat bahwa anggota kepolisian menerapkan hukum pada saat bertugas, akan tetapi tidak menerapkan hukum tersebut pada saat diluar tugas.

Bukan hanya pada saat bertugas dan tidak bertugas oknum kepolisian melakukan tindak pidana kekerasan, Adapun data mengenai kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian dilihat dari pangkat atau jabatannya, antara lain sebagai berikut :

Table 4

Pangkat Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan pada
tahun 2013-2015

Nomor	Pangkat / jabatan	Melakukan Tindak Pidana Kekerasan
1	Jendral polisi	-
2	Komisaris Jendral Polisi	-
3	Inspektur Jendral polisi	-
4	Brigadir Jendral Polisi	-
5	Komisaris Besar Polisi	-
6	Ajun Komisaris Besar Polisi	-
7	Komisaris Polisi	2
8	Ajun Komisaris Polisi	-
9	Inspektur Polisi Satu	4
10	Inspektur polisi Dua	2
11	Ajun Inspektur Polisi Satu	2
12	Ajun Inspektur Polisi Dua	3
13	Brigadir Polisi Kepala	4
14	Brigadir Polisi	2
15	Brigadir Polisi Satu	3
16	Brigadir Polisi Dua	-
Jumlah		22

Sumber: Polrestabes Kota Makassar 2017

Dari table diatas penulis dapat simpulkan bahwa pada wilayah
hukum Polrestabes Kota Makassar, pada jabatan Komisaris Polisi

terdapat 2 (dua) kasus Kekerasan. Pada jabatan Inspektur Polisi Satu terdapat 4 (empat) kasus Kekerasan. Pada jabatan Inspektur Polisi Dua terdapat 2 (dua) kasus Kekerasan. Pada Jabatan Ajun Inspektur Polisi Satu terdapat 2 (dua) kasus Kekerasan. Pada Jabatan Ajun Inspektur Polisi Dua terdapat 3 (tiga) kasus Kekerasan. Pada jabatan Brigadir polisi Kepala terdapat 4 (empat) kasus Kekerasan. Pada Jabatan Brigadir polisi terdapat 2 (dua) kasus Kekerasan. Dan pada jabatan Brigadir Polisi Satu terdapat 3 (tiga) Kasus Kekerasan.

Menurut data tabel di atas, pangkat / jabatan yang paling banyak melakukan Tindak Pidana Kekerasan adalah pangkat Inspektur Polisi satu dengan 4 (empat) kasus dan Brigadir Polisi Kepala dengan 4 (empat) kasus. Pada tabel diatas kita dapat ketahui bersama bahwa kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian dapat berasal dari pangkat atau jabatan mana saja, karena kita ketahui bersama bukan pangkat atau jabatan yang membuat anggota kepolisian sadar akan hukum, tetapi jiwa, akal dan rasa tanggung jawab yang besar yang dimiliki setiap individu anggota kepolisian.

Adapun hasil wawancara dengan Kasi Propam Polrestabes Kota Makassar, Kompol Arifuddin A, S.E.,M.H. pada hari rabu tanggal

4 Januari 2017 mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian dipicu faktor-faktor sebagai berikut :³⁴

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Sosial, dan
3. Faktor Budaya

Keempat faktor Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian telah diuraikan di atas, akan penulis jelaskan lebih lanjut berdasarkan pendekatan kriminologis dan hasil wawancara sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Belakangan ini anggota polisi kerap bertindak diluar batas yang tak segan-segan melakukan Tindak Pidana Kekerasan ataupun lebih dari pada itu terhadap masyarakat maupun orang terdekatnya. Hal tersebut dipicu karena beban ekonomi. Didunia yang semakin mengglobal saat ini sudah bermacam-macam tuntutan ekonomi. Tuntutan ekonomi tersebut misalnya melengkapi segala kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga tersebut berbeda-beda diantaranya, kebutuhan anak, istri atau suami, sanak saudara, hingga orang tua. Hal tersebut yang selalu menjadi beban seorang anggota polisi. Tidak

³⁴ Hasil Wawancara dengan Kompol Arifuddin A, S.E.,M.H., Pada Tanggal 4 Januari 2017 pada pukul 09:00 WITA.

jarang dengan tumpukan tuntutan ekonomi yang begitu berat sehingga membuat tugas dari anggota kepolisian dikesampingkan.

Tekanan yang begitu berat yang dirasakan anggota kepolisian tersebut dalam menyelesaikan masalah perekonomiannya pun berbeda-beda. Misalnya contoh salah satu anggota kepolisian berinisial MAK dengan pangkat Brigadir Polisi Kepala, anggota polisi tersebut dalam menyelesaikan masalah perekonomiannya polisi tersebut selalu membuat bantuan berupa “hutang” kepada rentenir. Gaji pokok yang diterima sebulan oleh polisi dengan pangkat Brigadir Polisi Kepala tersebut adalah sebantak Rp 3,610,500,00. Gaji tersebut belum diterima sepenuhnya oleh polisi tersebut, karena masih ada potongan-potongan pajak yang ditangguhkan. Dalam sebulan polisi tersebut harus membayarkan hutangnya kepada rentenir sebanyak Rp 500.000,00 belum lagi kebutuhan keluarga termasuk anak dan istrinya. Hal tersebut membuat polisi bertindak diluar batas karena ada beban ekonomi yang ditanggung. Hal tersebut dapat merubah secara signifikan sikap dari polisi tersebut.

Menurut pendapat dari Kasi Propam Polrestabes Kota Makassar, Kompol Arifuddin A, S.E.,M.H untuk meminimalisir gunjangan-gunjangan tersebut setiap pejabat polisi setingkat kanit, kasat bahkan sampai ke kapolres bias memperhatikan perubahan sikap yang signifikan dari anggotanya.

2. Fator Sosial

Menurut Kasi Propam Polrestabes Kota Makassar, Kopol Arifuddin A, S,E.,M.H faktor sosial yang menyebabkan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisin berasal dari penyakit-penyakit sosial. Sebnarnya lahirnya penyakit sosial berasal dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Penyakit sosial tersebut diantaranya :

a. Minuman Keras (Miras)

Minuman keras adalah minuman yang memiliki kandungan alcohol lebih dari 5 persen. Keberadaan miras di Indonesia sangat dibatasi oleh aturan pemerintah. Orang-orang yang menyalahgunakan miras akan dikenai sanksi. Adapun yang dimaksud penyalahgunaan di sini adalah suatu bentuk pemakaian yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ambang batas kesehatan. Pada dasarnya minuman keras dapat digunakan sejauh hanya untuk pengobatan atau kesehatan yang dibawah pengawasan dokter. Tetapi minuman keras tersebut disalahgunakan oleh masyarakat untuk mabuk-mabukan. Dan lebih parahnya lagi bukan hanya masyarakat secara umum mengkonsumsi minuman keras tersebut tetapi beberapa aparat kepolisian juga turut serta mengkonsumsi minuman keras tersebut. Pada contoh kasus yang terjadi di

wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar salah satu anggota kepolisian berinisial MR berpangkat Inspektur Polisi Dua tertangkap basah melakukan kekerasan di tempat hiburan malam. Hal tersebut dipicu karena sebelum melakukan tindak Kekerasan polisi tersebut mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Alhasil polisi tersebut hilang kesadaran dan melakukan tindak kekerasan.

b. Berjudi

Berjudi merupakan salah satu bentuk penyakit sosial. Berjudi adalah cara mempertaruhkan harta atau nafkah yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Seseorang yang gemar berjudi, akan menjadi malas dan hanya berangan-angan mendapatkan banyak uang dengan cara-cara yang belum pasti. Hal tersebut dialami oleh salah satu anggota kepolisian wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar berinisial AS dengan pangkat Inspektur Polisi Satu. Polisi tersebut gemar berjudi online. Sampai suatu saat polisi tersebut melakukan tindakan KDRT terhadap istrinya akibat kurang transparansi terhadap gaji yang diterima oleh polisi tersebut.

c. Narkoba

Istilah narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obat terlarang. Berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pada saat ini bukan hanya masyarakat yang menggunakan narkoba tersebut, akan tetapi anggota kepolisian pun ikut menggunakan narkoba. Hal tersebut dapat membahayakan dalam penegakan hukum sekarang ini. Dalam penggunaan narkoba tersebut bukan hanya merusak diri sendiri, melainkan dapat merusak lingkungan sekitar yang ditimbulkan akibat ketergantungan terhadap narkoba tersebut. Jika sudah ketergantungan terhadap narkoba, orang tersebut akan melakukan berbagai cara untuk dapat mendapatkan narkoba tersebut misalnya mencuri, merampok dan merampas. Penyalahgunaan narkoba tersebut seringkali menyebabkan masalah kejiwaan dan kesehatan yang serius bagi penggunanya. Kehidupan sosial

pemakai narkoba menjadi terganggu, sukar bergaul dan cenderung mudah terpengaruh dalam tindak kejahatan. Pengaruh narkoba sangat besar dirasakan oleh penggunaannya seperti dapat menyebabkan gangguan mental dalam bentuk emosional, perilaku tidak terkendali, penurunan daya ingat yang sangat drastis, kerusakan sistem saraf pada otak. Hal tersebut sangat disayangkan apabila anggota kepolisian sampai menggunakan narkoba tersebut.

3. Faktor Budaya

Di wilayah hukum Polresta Kota Makassar, rata-rata anggota polisi tersebut bersuku Bugis dan Makassar. Yang dimana sifat lahiriah suku Bugis dan Makassar ini yang ingin di pandang oleh semua orang. Menilai pribadi secara umum orang Bugis dan Makassar akan banyak hal yang kita temukan. Salah satunya bentrok yang terjadi antara mahasiswa dan polisi. Ada nilai perlawanan yang selalu muncul dalam masing-masing individu. Tak akan menerima jika menganggap ada sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam Bahasa sehari-hari, *rewako*, *rewa* atau *rewako* yang artinya harus melawan, yang ketika tidak melawan berarti harga diri terinjak-injak.

Faktor budaya inilah biasa masuk kedalam diri seorang polisi pada saat terjadi demonstrasi. Pada saat kawanan massa yang tidak

bias diatur atau diluar dari proses demonstrasi dan dapat memancing amarah para petugas, hal tersebut yang mengakibatkan benrokpun terjadi. Menurut Kasi Propam Polrestabes Kota Makassar, Kopol Arifuddin A, S,E.,M.H dalam hal tersebut para anggota kepolisian tidak boleh terpancing amarahnya untuk melakukan pembalasan terhadap pendemo. Polisi juga harus mengenyampingkan ego untuk melawan dan mementingkan menertibkan para pendemo yang tidak dapat diatur lagi. Polisi juga harus berfikir atau mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah tidak dengan kekerasan.

B. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian, penulis memaparkan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan guna menanggulangi Tindak Pidana tersebut.

Usaha penanggulangan suatu Tindak Pidana, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat, aparat penegak hukum maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti apa yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin dihilangkan. Suatu tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kekerasan

amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku para pelaku banyak variasinya karena mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, yang dimana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut biasanya disertai dengan Pengancaman, Penganiayaan maupun KDRT.

Berikut penulis akan menguraikan hasil wawancara dengan Aiptu Resky Yospih tentang upaya yang dilakukan aparat penegak hukum meliputi upaya pre-emptif, preventif, represif:³⁵

1. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum timbulnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian dengan tujuan mencegah munculnya tanda-tanda kriminal dan mengarah adanya upaya paksa petugas seperti halnya dengan :

- a. Mengadakan kegiatan penyuluhan terhadap semua anggota kepolisian tentang tidak melakukan tindak kekerasan baik dalam tugas maupun diluar tugas.

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Resky Yospih, Pada Tanggal 4 Januari tahun 2017 pada pukul 14:00 WITA.

- b. Melakukan kegiatan yang menyangkut keagamaan.
- c. Melakukan kegiatan kerjasama antara masyarakat dan aparat kepolisian agar terjalin hubungan yang erat antara keduanya
- d. Memperkuat tali silaturahmi antar sesama anggota kepolisian dan juga aparat penegak hukum lainnya.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya kriminal, seperti dengan :

- a. Melakukan terjun lapangan langsung dan melihat bentuk pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
- b. Melaksanakan inspeksi rutin terhadap setiap anggota kepolisian.
- c. Memberikan sanksi, bukan hanya sanksi administrasi saja akan tetapi sanksi ganti kerugian dan juga penjara terhadap aparat yang melakukan tindak pidana kekerasan.

3. Upaya Respresif

Upaya repspresif adalah upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu tindakan kriminal, meliputi :

- a. Melakukan penangkapan langsung terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan.
- b. Berusaha mengungkapkan motif-motif apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian .
- c. Melakukan suatu peradilan khusus terhadap anggota yang melakukan tindak pidana kekerasan.
- d. Membuat suatu aturan khusus tentang tindakan-tindakan aparat kepolisian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 2 (dua) hal, sebagai berikut :

1. Meskipun jumlah kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian di wilayah hukum polrestabes kota Makassar dari tahun 2013 sampai dengan 2015 terbilang fluktuatif (tidak merata) tetapi tetap saja laporan kasus yang masuk di bagian Propam Polrestabes Kota makassar terbilang cukup banyak. Tetapi tidak serta merta kasus tersebut dapat langsung diselesaikan, butuh proses panjang untuk menyelesaikan kasus tersebut. Meskipun anggota kepolisian sadar akan hukum, tetapi masih banyak yang melakukan tindak kekerasan baik dilakukan pada saat bertugas maupun dilakukan pada saat diluan tugas. Tindak pidana kekerasan tersebut dipicu karena beberapa faktor, diantaranya :
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Faktor Sosial
 - c. Faktor Budaya

2. Upaya yang telah dilakukan aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian di Kota Makassar meskipun telah terlaksana tetapi kurang optimal. Berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, diantaranya :

a. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum timbulnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian dengan tujuan mencegah munculnya tanda-tanda kriminal dan mengarah adanya upaya paksa petugas seperti halnya dengan :

1. Mengadakan kegiatan penyuluhan terhadap semua anggota kepolisian tentang tidak melakukan tindak kekerasan baik dalam tugas maupun diluar tugas.
2. Melakukan kegiatan yang menyangkut keagamaan.
3. Melakukan kegiatan kerjasama antara masyarakat dan aparat kepolisian agar terjalin hubungan yang erat antara keduanya

4. Memperkuat tali silaturahmi antar sesama anggota kepolisian dan juga aparat penegak hukum lainnya.

b. Upaya Preventif

Upaya Preventif yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya kriminal, seperti dengan :

1. Melakukan terjun lapangan langsung dan melihat bentuk pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
2. Melaksanakan inspeksi rutin terhadap setiap anggota kepolisian.
3. Memberikan sanksi, bukan hanya sanksi administrasi saja akan tetapi sanksi ganti kerugian dan juga penjara terhadap aparat yang melakukan tindak pidana kekerasan.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu tindakan kriminal, meliputi :

1. Melakukan penangkapan langsung terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan.
2. Berusaha mengungkapkan motif-motif apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian .
3. Melakukan suatu peradilan khusus terhadap anggota yang melakukan tindak pidana kekerasan.
4. Membuat suatu aturan khusus tentang tindakan-tindakan aparat kepolisian.

Upaya-upaya tersebut harus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya. Karena dari segi hasilnya, masih perlu ditingkatkan karena banyak laporan yang masuk tentang kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

B. Saran

Dari penelitian diatas, penulis memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat atau menjadi suatu bahan pertimbangan dalam upaya menanggulangi atau meminimalisir tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian di Kota Makassar.

1. Aparat penegak hukum bersama dengan pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat lebih menjalin kerjasama yang erat, agar ada saling pengertian antara ke-4 (empat) elemen tersebut agar nantinya tidak akan terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian terkhusus dan pada masyarakat pada umumnya.
2. Perlunya penanganan atau sanksi yang tegas dari masing-masing aparat penegak hukum terkhusus kepada kepolisian. Karena dengan sanksi yang dapat memberatkan para pelaku kejahatan dapat menekan angka kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
3. Menambah reklame atau instrument informasi di Polrestabes Kota Makassar agar anggota polisi yang bertugas di sana tidak melakukan tindak pidana kekerasan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- A.S.Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali pers, Jakarta.
- Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Barda Namawi Arief, 1998, *Beberapa aspek kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Hamzah Andi, 2008, *Pengantar Hukum Indonesian*, rajawali pers, bandung.
- Johan Andreas S, Skripsi, *Peranan Kepolisian dalm pemberantasan minuman keras (miras) di wilayah hukum Polsek Medan Kota*. (Medan : Fakultas Hukum USU, 2006).
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana*, Jakarta, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta, 2001.
- Kunarto, *perilaku organisasi POLRI*, (Jakarta : Penerbit Cipta Manunggal, 2001).
- Muladi dan Barda Nawari, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, jokjakarta.
- Santoso Topo dan Achjani Zulfa Eva, 2006, *Kriminologi*, Rajawali Pers, bandung.
- Sianturi, *Hukum Pidana*, 1983.
- Soesilo R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politelia, Bogor.
- Suhartini Eni, *undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Yesmil Anwar, *kriminologi*, PT. Refika Aditama, bandung, 2013.

WEBSITE :

Abd Ar Rahman Bin Muhammed Ibn Mukadimah, terjemahan Franz Rosenthal, ditelusuri melalui http://www.muslimphilosophy.com/ik/Muqaddimah/Chapter1/Ch_1_01.htm diakses pada tanggal 19 November 2016, pukul 10.00



KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : SKP / 01 / 11 / 2017 / Subbagkum

Rujukan :

Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor : 17061 / UN4.5.3 / PL .02 / 2017, tanggal 14 Desember 2017. Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

N a m a : FARIYADI DWI AT
NIDN : B11 113 386
Bagian : Hukum Pidana
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Kota Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan judul : " **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2013 - 2015)** "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 4 Januari 2017

a. n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SUMDA POLRESTABES MAKASSAR



BURHAN, S.Sos, S.H, MH

KOMISARIS POLISI NRP 64050217

tembusan :

Kapolrestabes Makassar
Dekan Fakultas Hukum UNHAS